Isu Sepekan
Bidang Ekkuinbang, Komisi XI
Minggu ke-3 Juni
(17 s.d. 23 Juni 2022)
2022

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

UPAYA PENGENDALIAN INFLASI DOMESTIK DI TENGAH TINGGINYA INFLASI GLOBAL

Venti Eka Satya
Peneliti Madya
venti.satya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan perekonomian 60 negara di dunia akan jatuh dan 42 diantaranya sudah menuju keruntuhan. Hal ini disebabkan oleh tingginya inflasi akibat pandemi yang berkepanjangan, serta krisis pangan dan energi akibat kendala rantai pasok dan konflik Rusia-Ukraina. Padahal, selama pandemi bank sentral Amerika dan hampir semua bank sentral di dunia mencetak uang triliunan dolar AS untuk mengimbangi berhentinya aktivitas usaha akibat pembatasan sosial selama pandemi. Akibatnya, timbul ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan yang mengakibatkan harga naik dan memicu inflasi.

Pada bulan Mei 2022, tingkat inflasi Turki sebesar 69,97%, Argentina 55,1%, Rusia 12.13%, Brazil 16,7%, Belanda 9,6%, Spanyol 8,4%, Amerika Serikat 8,3%, Meksiko 7,68%, Jerman 7,4%, serta Inggris Raya 7%. Di Amerika dan Jerman, inflasi mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir, di Amerika Latin merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sedangkan di sub-sahara Afrika inflasi tahun ini mencapai 12,2%, di Australia berlipat ganda menjadi 5,3%, dan Indonesia tertinggi sejak 2017. Untuk menekan inflasi di Amerika, *The Fed* menaikkan suku bunga sebesar 0,75% pada Juni 2022. Diperkirakan, pada Juli 2022, *The Fed* kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,75%.

Kepala Ekonom Bank Dunia Indonesia dan Timor Leste menyatakan, inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada di level 3,6% *year on year* (yoy), atau meningkat dari capaian inflasi pada tahun 2021 yang sebesar 1,87% yoy. Akan tetapi, masih ada potensi peningkatan inflasi seiring dengan kondisi global. Potensi peningkatan inflasi ini juga akan membawa risiko terhadap kondisi fiskal Indonesia. Kondisi ini memaksa kebijakan fiskal merealokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi ke anggaran subsidi. Selain itu, potensi peningkatan inflasi juga akan memengaruhi kebijakan moneter. Bila inflasi terus meningkat, maka Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga acuannya. Sejauh ini, BI masih menekan tingkat suku bunga acuannya. Gubernur BI memperkirakan tahun ini inflasi Indonesia akan berada pada kisaran 4,2% yoy. Kondisi inflasi Indonesia masih lebih baik daripada peningkatan harga di negara-negara lain, hal ini dikarenakan BI dan pemerintah sigap dalam menekan pergerakan harga di dalam negeri.

Menteri perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pemerintah sudah bekerja keras untuk mengedalikan inflasi domestik agar tidak terlalu terpengaruh oleh volatilitas harga pangan dan energi global. Pemerintah telah mensubsidi beberapa komoditas pangan seperti kedelai dan jagung, begitu juga dengan beras, akan disubsidi bila terus mengalami kenaikan harga. Namun, tidak dapat dihindari ada beberapa komoditas yang mengalami kanaikan karena faktor musiman seperti cabai dan bawang.

Pemerintah memperkuat daya beli masyarakat dengan memberikan subsidi dan bantuan sosial. Subsidi yang diberikan pemerintah juga menjaga agar harga-harga energi dalam negeri tidak meroket. Dari sisi BI, BI sudah melakukan pengurangan likuiditas di perbankan lewat peningkatan tarif Giro Wajib Minimum (GWM), seperti yang telah dijadwalkan. Namun, langkah ini diyakini tetap tidak akan mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit maupun membeli Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, BI dan pemerintah berkolaborasi lewat tim pengendalian inflasi (TPI) baik pusat maupun daerah untuk menjaga suplai. Salah satu kunci dalam menjaga inflasi memang menjaga suplai memadai dalam memenuhi permintaan masyarakat. Dengan langkah yang diambil tersebut, BI masih optimis inflasi akan mereda. Sehingga, pada tahun 2023, inflasi akan kembali ke kisaran sasaran yang sebesar 2% yoy hingga 4% yoy.

Atensi DPR

Pergerakan harga komoditas global semakin tidak terkendali. Bahkan otoritas publik terkadang tidak mampu mengatasinya, hal ini berdampak pada meroketnya tingkat inflasi. Tingginya tingkat inflasi telah mempengaruhi kebijakn fiskal nasional dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi. Hal ini bertujuan untuk menekan harga barang dan mempertahankan daya beli masyarakat. Tingginya alokasi subsidi ini tentunya akan mempersempit ruang fiskal negara dan berpotensi meningkatkan defisit. DPR RI dalam hal ini Komisi XI perlu terus memantau kebijakan fiskal pemerintah agar tidak semakin memperdalam defisit yang berakibat pada terhalangnya rencana *soft landing* di tahun 2023. Kebijakan pengendalian harga harus dicarikan solusi berbeda, selain dengan meningkatkan nilai subsidi. Subsidi hanyalah solusi sementara. Pemerintah harus mencari akar permasalahan kenaikan harga ini, dan melakukan langkah konkret seperti meningkatkan produksi dan memperlancar rantai pasok komoditas.

Sumber

antaranews.com, 21 & 22 Juni 2022;
kompas.com, 22 Juni 2022;
nasional.kontan.co.id, 23 Juni 2022; dan
tempo.co, 17 Mei 2022.

2022

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

https://puslit.dpr.go.id
@puslitbkd_official
©PuslitBK2022

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S
Sri Nurhayati Q
Sulasi Rongiyati
Edmira Rivani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.